

## MUTU PERMUKIMAN BANTARAN SUNGAI DI BANJARMASIN

Kurnia Widiastuti  
Jurusan Arsitektur Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin

### Abstrak

Secara empiris daerah bantaran sungai di kota selalu digunakan terutama oleh masyarakat ekonomi bawah sebagai hunian, tidak terkecuali di Banjarmasin. Budaya kehidupan masyarakat banjarmasin tumbuh dan berkembang dari sungai. Dari situ awal berdirinya rumah-rumah "lanting" alias rumah yang berdiri di atas air. Oleh sebab itu sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupannya di sungai, baik dari transportasi, mata pencaharian, sampai mandi cuci kakus. Permasalahan selanjutnya adalah bahwa keberadaan rumah kumuh di bantaran sungai merupakan penyebab masalah ekologi, pencemaran, dan pendangkalan sungai yang berakibat turunnya kualitas lingkungan permukiman.

Tujuan penulisan ini mengarahkan pembangunan perumahan sebagai bagian suatu lingkungan permukiman yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan permukiman di kawasan perkotaan.

Perencanaan perbaikan mutu lingkungan permukiman bantaran Sungai hendaknya mendapat dukungan dan peran serta dari masyarakat dan pihak-pihak terkait baik dari dana maupun *ethic social* nya.

*Kata Kunci : permukiman bantaran sungai, penurunan kualitas ekologi, perbaikan mutu lingkungan*

### Pendahuluan

Ada tiga kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan hidup, yaitu sandang, pangan dan papan. Bicara mengenai kebutuhan manusia, tidak lepas dari teori Abraham Maslow tentang piramida kebutuhan manusia berkaitan dengan tingkat sosialnya. Semakin tinggi tingkatb sosial, semakin tinggi pula tingkat kebutuhan hidup. Pada tingkat terendah, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pada tingkat sosial tertinggi, manusia akan berusaha agar keberadaannya diakui oleh lingkungan sekitar.

Dengan adanya perbedaan tingkat sosial masyarakat, terjadi jarak antara kaya dan miskin yang menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kelas bawah umumnya menempati lahan-lahan

kosong di kota yang tidak jelas peruntukannya, seperti tepian rel kereta api, maupun di bantaran sungai seperti yang terjadi di Banjarmasin.

Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Propinsi Kalimantan Selatan dikenal sebagai "kota seribu sungai", dilalui banyak sungai besar maupun kecil seperti Sungai Barito, Sungai Kuin, Sungai Kelayan, Sungai Martapura, dan lain-lain. Budaya kehidupan masyarakat Banjarmasin tumbuh dan berkembang dari sungai. Dari situ awal berdirinya rumah-rumah "lenting" alias rumah yang berdiri di atas air. Oleh sebab itu sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupannya di sungai, baik dari transportasi, mata pencaharian, sampai mandi cuci kakus. Hal tersebut berlangsung terus menerus sehingga memberikan dampak buruk bagi kehidupan ekologi sungai maupun manusianya sendiri. Dan kenyataannya sekarang ini 92% penghuni rumah lenting adalah masyarakat ekonomi lemah.

Kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan perumahan. Namun sayangnya peningkatan tersebut tidak diikuti dengan ketaatan pada peraturan daerah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Hal ini yang sering terlihat pada permukiman bantaran sungai di Banjarmasin. Bahkan ada yang berdiri di atas sungai dengan tiang rumah di alur sungai. Tentu saja hal itu akan mengganggu aliran sungai, ditambah lagi limbah domestik dari masyarakat, akan meningkatkan nilai kekumuhan kawasan.

Hakekatnya yang dinamakan tempat tinggal atau sekelompok hunian yang disebut permukiman harus memberikan rasa nyaman, terlindungi dan sehat bagi penghuninya. Rumah yang sehat dan terletak pada lingkungan permukiman yang sehat pula adalah idaman bagi setiap keluarga, karena rumah dan lingkungan merupakan sarana pembina keluarga yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan watak penghuni. Memperhatikan arti penting dari rumah dan lingkungan sebagai sarana pembinaan keluarga, maka pembangunan maupun peningkatan kualitas permukiman merupakan langkah yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan penurunan kualitas permukiman bantaran sungai ini perlu dilakukan pendekatan yang menyeluruh baik secara fisik maupun non fisik.

**Tujuan :**

Tujuan penulisan ini mengarahkan pembangunan perumahan sebagai bagian suatu lingkungan permukiman yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan permukiman di kawasan perkotaan.

**Metoda penelitian :**

**Teknik pengumpulan data :**

1. Tahap pendahuluan; mengkaji fenomena yang terjadi pada kawasan studi, mengidentifikasi masalah dan kemudian merumuskan masalah menentukan tujuan dan sasaran studi
2. Tahap pengumpulan data; meliputi kegiatan pekerjaan persiapan, pelaksanaan survey dan kompilasi data. Pekerjaan persiapan dilakukan dengan kegiatan studi pustaka, undang-undang dan peraturan yang ada.
3. Tahap hasil dan pembahasan; dilakukan dengan menganalisis kondisi eksisting kawasan dan pembahasan untuk menghasilkan konsep perencanaan.
4. Tahap kesimpulan yang merupakan rangkuman secara ringkas dari hasil pembahasan.

**Teori Pendukung**

Secara umum masalah perumahan mencakup kuantitas dan kualitas

1. Kuantitas, dimana jumlah rumah yang ada masih kurang dibandingkan dengan jumlah total keluarga, khususnya di perkotaan dan sebagian besar memiliki kualitas rendah baik dari segi konstruksi maupun kesehatan.
2. Kualitas, diakibatkan oleh penciptaan kawasan baru yang ditekankan pada aspek fisik dan pengejaran target kuantitas sementara kawasan yang sudah ada tumbuh dan berkembang pesat tanpa terkendali karena kurang adanya tertib dan pengawasan pembangunan.

Permasalahan perumahan juga timbul ketika rumah dianggap sebagai komoditi, sebagai produk barang jadi. Aspek sosial budaya, kesejahteraan

ekonomi, tata nilai, dan perilaku manusianya diabaikan dan lepas dari pengamatan. Sedangkan secara esensial, perumahan rakyat adalah aktivitas lokal dan bukan merupakan komoditi impor yang hanya pantas diurus oleh orang yang bertengger di puncak piramid. Dengan demikian perlu adanya kesempatan untuk setiap keluarga dapat berekreasi dan mengejawantahkan diri dalam membangun dan merencanakan rumahnya.

Dalam UU Perumahan dan permukiman tahun 1992 dijelaskan bahwa untuk mencapai rumah yang layak huni, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis, meliputi keselamatan, dan kenyamanan bangunan, keandalan, dan sarana-prasarana lingkungan.
2. Persyaratan ekologis berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan sosial budaya.
3. Persyaratan administratif, berkaitan dengan pemberian ijin usaha, ijin lokasi, dan IMB.

Pada permukiman daerah rawa, ataupun bantaran sungai yang sebagian besar penduduknya berpendapatan rendah. Menurut Bambang Panudju (1999), kriteria yang diperlukan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah:

1. Lokasi tidak terlalu jauh dari tempat kerja
2. status kepemilikan lahan dan rumah jelas
3. bentuk dan kualitas cukup memenuhi fungsi dasar yang diperlukan penghuni
4. harga atau biaya pembangunan sesuai dengan tingkat pendapatan

## **Kondisi Permukiman Bantaran sungai**

### **1. Kependudukan**

Saat ini sebagian besar masyarakat penghuni permukiman bantaran sungai merupakan pendatang/imigran dari beberapa wilayah di Kalimantan Selatan seperti Kandangan, Barabai, Batu Licin, dan beberapa wilayah lain.

Mata Pencaharian banyak macamnya, dari jasa penewaan perahu, tukang becak, sampai sopir taxi. Pada dasarnya penghuni adalah kelas menengah ke bawah.

## **2. Kondisi Fisik**

Konstruksi rumah bantaran sungai atau rumah lanting terbuat dari kayu dengan tipe rumah panggung. Kondisi bangunan rata-rata memprihatinkan.

Penyebaran bangunan seringkali mencapai 4 sampai 10 lapis dengan kerapatan bangunan sangat tinggi. Pada lapis pertama hanya dipisahkan oleh ruang yang terbentuk oleh bangunan. Pada lapis berikutnya rata-rata tidak mempunyai ruang pemisah antar bangunan. Garis sempadan bangunan pada umumnya hanya dimiliki oleh bangunan yang ada di sepanjang jalan, sedangkan bangunan pada lapis berikutnya berorientasi ke titian, sehingga praktis tidak memiliki GSB. Ketinggian bangunan sebagian besar satu lantai.

Kebutuhan penduduk akan MCK masih tergantung pada sungai. Demikian pula dengan limbah manusia, sebagian besar langsung dibuang ke sungai dengan menggunakan jamban keluarga. Saptictank digunakan pada sebagian kecil rumah saja. Jaringan air bersih PDAM sebenarnya sudah masuk, namun tidak semua penduduk memanfaatkan fasilitas tersebut, mengingat kondisi ekonomi yang masih lemah.

Sarana pembuangan sampah praktis tidak ada, kebiasaan masyarakat cenderung membuang sampah ke sungai melalui bukaan-bukaan pada rumah atau lewat sela-sela lantai papan kayu. Kadang-kadang ada juga yang membakar sampahnya,

Melihat kondisi nyata di bantaran sungai, dapat dibayangkan seperti apa secara visual. Betapa kumuhnya Banjarmasin... lalu apa pengaruh dari Slogan Banjarmasin BUN GAS (Bersih, Unggul, Nyaman, Asri dan Sehat)

## **Pembahasan**

Ada beberapa cara untuk menyikapi hal tersebut. Cara pertama adalah mengamati dari sisi negatif. Sikap seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai bayangan kota yang ideal seperti kota-kota di negara maju. Dengan melihat dari sisi negatif bisa dipastikan bahwa kesimpulan akhirnya adalah implementasi strategi penggusuran permukiman kumuh. Saat masyarakat miskin digusur dari permukimannya, kebanyakan tidak akan keluar dari kota, melainkan berusaha mencari tempat kosong lain dan

mendirikan rumah baru. Dengan demikian strategi pengusiran bukan menyelesaikan, melainkan hanya memindahkan masalah ke bagian lain kota. Kadangkala menurunnya kualitas perumahan diakibatkan oleh penciptaan kawasan baru yang ditekankan pada aspek fisik dan pengejaran target kuantitas sementara kawasan yang sudah ada tumbuh dan berkembang pesat tanpa terkendali karena kurang adanya tertib dan pengawasan pembangunan. Kebijakan pemerintah tentang peraturan-peraturan pembangunan baru di kawasan bantaran sungai harus lebih disosialisasikan lagi. Namun kompensasi biaya yang ditawarkan pada masyarakat tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga peraturan daerah hanya sekedar angin lalu.

Cara kedua adalah mencoba melihat dari dekat dan memahami masyarakat berpendapatan rendah ini dalam mempertahankan hidupnya, dengan cara mencoba memperbaiki kualitas permukiman dan mengembangkan sisi positif yang bisa diidentifikasi. Dengan memandang segi positif permukiman bantaran sungai, dapat dipikirkan kelanjutan bagaimana solusi sehingga kawasan kumuh tersebut layak huni dan sehat. Perbaikan kualitas permukiman akan menstimulus masyarakat miskin untuk semakin meningkatkan taraf hidup. Dalam hal ini budaya kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Pendekatan model proteksi, dapat dilakukan dengan cara adanya dukungan kekuatan politis dan dana dari luar. Contohnya penataan tepian Sungai Code seperti yang pernah dilakukan oleh Romo Mangun dan kawan-kawan yang menjadi figur kekuatan dari luar yang melindungi kampung. Atau dengan model berbagi kepentingan, yaitu penataan hunian di bantaran sungai diharapkan dapat menghasilkan ruang bebas dengan pihak swasta melakukan kegiatan ekonomi, sementara di sisi lain penduduk di permukiman setempat menjadi pemegang saham dari kegiatan ekonomi yang ada. Diharapkan pihak swasta akan berperan langsung maupun tidak dalam peningkatan kualitas lingkungan yang mereka masuki.

Pendekatan lain dalam peningkatan mutu kawasan permukiman adalah tentu saja adanya kebijakan dari pemerintah. Salah satu cara adalah dengan revitalisasi kawasan permukiman bantaran sungai. Namun cara ini tentu saja memerlukan waktu yang panjang sekali dan juga partisipasi masyarakat harus bisa lebih dipupuk lagi karena Revitalisasi kawasan ini bisa

mencakup pada rencana-rencana peruntukan lahan, perpetakan, blok kawasan, sistem pergerakan, utilitas, wujud bangunan serta ruang terbuka.

Rencana revitalisasi tentu saja melibatkan semua pihak, oleh karena itu partisipasi masyarakat khususnya penghuni bantaran sungai diharapkan bisa diandalkan. Kesadaran berbudaya di tepian sungai yang tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini sebaiknya dihilangkan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, konsepsi perbaikan mutu lingkungan perumahan bantaran sungai dengan mengembangkan kearifan masyarakat dan nilai-nilai tradisional dapat menjadi dasar perbaikan kawasan tepi sungai.

Beberapa konsep dasar dapat diwujudkan dengan bertitik tolak dari berbagai pendekatan, strategi dan persyaratan pengembangan kawasan antara lain :

1. Pendekatan perencanaan yang didasarkan pada rencana makro suatu tepi air pada umumnya dan tepi sungai pada khususnya, sehingga rencana pengembangan permukimannya harus merupakan turunan dari rencana makro kota induknya.
2. Pendekatan perencanaan yang memanfaatkan keberadaan air sebagai bagian depan dari bangunan, orientasi kegiatan penduduk, pintu gerbang.
3. Pendekatan yang melibatkan semua pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat setempat)
4. Pendekatan perencanaan yang didasarkan pada pertimbangan inovasi teknologi tetapi masih dalam kelayakan ekonomi
5. Kearifan lokal, mempertimbangkan sosial budaya komunitas masyarakat kawasan tersebut serta dengan mengembangkan kearifan lokal dalam mengelola lingkungan alam dan buatan.

## **Daftar Pustaka**

- Budiharjo, Eko. 1997. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Alumni. Bandung
- . 1998. sejumlah *Masalah Permukiman Kota*, Alumni. Bandung

DPU. 2001. *Bantuan Teknis Perencanaan Revitalisasi Kawasan Kuin Utara Banjarmasin*. PT Kaibon Resirekayasa. Jakarta

Frick, Heiz. 1996. *Dasar-Dasar eko Arsitektur*. Kanisius. Semarang

Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Alumni. Bandung

Soemarwoto, Otto. 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan. Jakarta.



**Gambar 1. Jamban Lingkungan**



**Gambar 2. Lingkungan Perumahan**